



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Pengaruh Kompetensi SDM, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Suwawa Selatan

Sahmin Noholo^a, Mohammad Zubair Hippy^b

^{a, b, c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128, Indonesia

email : sahminnohola@ung.ac.id^a, moh.zubairhippy@gmail.com^b

INFO

ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 18-01-2021

Revised 16-02-2021

Accepted 16-02-2021

Kata Kunci: Aset
Pengelolaan
Keuangan Desa,
Kompetensi SDM,
Prinsip Akuntabilitas

Keywords: Village
Financial Management,
HR Competence,
Accountability Principles

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM dan prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kuantitatif dengan cara pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai. Analisis data yang digunakan yakni regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan kompetensi SDM aparat desa dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,435 yang berarti bahwa nilai determinan kompetensi SDM aparat desa dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango sebesar 43,50% . Sedangkan sisanya sebesar 56,50% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor tersebut yakni pengetahuan aparat desa, keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa, pendidikan aparat desa, integritas aparat desa, motivasi kerja aparat desa, transparansi pengelolaan keuangan desa, disiplin kerja serta sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of human resource competence and the principles of accountability in village financial management in South Suwawa District, Bone Bolango Regency partially or simultaneously. The research method used is quantitative methods by means of data through distributing questionnaires to employees. The data analysis used is multiple regression. The results showed that partially or simultaneously the competence of human resources of village officials and the principle of accountability in village financial management had a positive and significant effect on village financial management in Suwawa Selatan District, Bone Bolango Regency. The coefficient of determination is 0.435, which means that the determinant value of the competence of village officials and the principle of accountability for village financial management on village financial management in Suwawa Selatan District Bone Bolango Regency is 43.50%. While the remaining 56.50% can be provided by other variables not examined in this study. These factors are the knowledge of village officials, skills in village financial management, education of village officials, integrity of village officials, work motivation of village officials, transparency of village financial management, work discipline and the internal control system implemented by the village government.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang baik pula menjadi suatu acuan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk melaksanakan otonomi daerah terkait dengan pengelolaan dana yang menjadi tujuan dari desentralisasi keuangan. Fenomena mengenai alokasi dana desa sebagaimana menurut Azhar (2017) bahwa terdapat berbagai kendala terkait dengan implementasi pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien, karena yang menjadi masalah adalah di dalam pelaksanaan terjadi hambatan-hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa, yang disebabkan pada perkiraan-perkiraan anggaran dengan tidak merincikan sebaik mungkin apa yang akan direncanakan dalam pembangunan, sehingga berimbas pada pelaksanaan pembangunan.

Masalah ini menunjukkan gambaran bahwa adanya masalah dengan kemampuan aparat desa yakni minimnya pengetahuan tentang pelaksanaan pembuatan rancangan alokasi dana desa yang diakibatkan kurangnya pelatihan pemerintah daerah dalam memberikan petunjuk tentang prosedur pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian penyerapan anggaran juga belum maksimal yang menunjukkan bahwa pembangunan mulai kurang mengacu pada RPJMD. Berbagai masalah tersebut diduga dipengaruhi oleh kompetensi SDM dari aparat desa karena dalam suatu pengelolaan keuangan tentu membutuhkan suatu aparat yang kompeten dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Keterkaitan antara kompetensi SDM dengan pengelolaan alokasi dana desa dinyatakan oleh Basalamah (2017) bahwa kompetensi SDM dari seorang aparat atau pegawai akan mampu mencapai tujuan dari suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan di tingkat desa. Selain kompetensi SDM, faktor penting yang tidak kalah penting yakni aspek pertanggungjawaban dari aparat desa atas pengelolaan keuangan yang dilakukan yang dalam hal ini adalah prinsip akuntabilitas. Keterkaitan antara prinsip akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan desa atau alokasi dana desa sebagaimana diungkapkan oleh Sabarno (2007) bahwa prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa dan faktor determinannya penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan terdapat berbagai kendala terkait dengan kinerja pemerintah desa diantaranya implementasi pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien.

Permasalahan mengenai pengelolaan alokasi dana desa sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan badan pengawas desa (BPD) bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan utama dari alokasi dana desa, adapun permasalahan yang terjadi yaitu belum adanya perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kompetensi SDM dan prinsip akuntabilitas terhadap

pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan ADD dalam Keuangan Desa (APBDes) Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang dikenal adanya beberapa asas yang sudah lazim digunakan selama ini yaitu asas tuhanan, iniversalita, spesialisitas, dan kesatuan. Asas tuhanan artinya membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu (Mursyidi, 2010).

Kompetensi SDM Aparat Desa

Sedarmayanti (2014) mengemukakan bahwa kompetensi SDM adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi SDM adalah apa yang outstanding performers lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik daripada apa yang dilakukan penilai kebijakan. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah perilaku. Abdussamad (2014) membagi kompetensi SDM dalam dua tingkatan yakni ada yang tampak dan yang tidak tampak, spencer dan spencer mengilustrasikan seperti gunung es di mana ada yang tampak di permukaan, adapula yang tidak terlihat di permukaan. Kompetensi SDM yang tampak di permukaan adalah Pengetahuan (*Knowledge*) dan Keterampilan (*Skill*), kompetensi SDM yang tidak tampak di permukaan adalah Nilai-nilai (*Srole*), konsep diri (*self image*), karakteristik personal (*traits*), dan motif (*motives*).

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

METODE PENELITIAN

Lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah Pemerintah Desa se Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango sebanyak 72 orang. Analisis yang digunakan yakni regresi berganda. Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

\hat{Y} = Pengelolaan ADD

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Kompetensi SDM Aparat Desa

X_2 = Prinsip akuntabilitas

ε = Tingkat Kesalahan (*error*)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Pengujian dalam penelitian ini diawali dengan pengujian validitas dan reliabilitas yang dilakukan kepada 30 orang aparat desa di luar dari sampel yang digunakan. Hasil analisis ditemukan bahwa seluruh pernyataan di tiap tiap variabel berstatus valid dan reliabel.

1. Penaksiran Model Regresi

Hasil analisis SPSS ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Analisis Regresi

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 6.061 | 7.472 | | .811 | .420 |
| 1 Kompetensi SDM | .444 | .134 | .354 | 3.329 | .001 |
| Prinsip akuntabilitas | .420 | .109 | .409 | 3.842 | .000 |

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil analisis di atas, model regresi linear sederhana yang bangun adalah:

$$\hat{Y} = 6,061 + 0,444X_1 + 0,420X_2 + e$$

2. Pengujian Hipotesis Parsial

Berdasarkan hasil pada tabel 1 maka dapat dijabarkan berikut ini hasil pengujian parsial:

1) Pengaruh Kompetensi SDM aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa

Nilai t_{hitung} untuk variabel Kompetensi SDM aparat desa diperoleh sebesar 3,329 sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas $n-k-1$ atau $72-2-1=69$ sebesar 1,995. Jika kedua nilai t tersebut dibandingkan maka nilai t_{hitung} masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($3,329 > 1,995$). Maka kompetensi SDM aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa kompetensi SDM aparat desa memberikan dampak yang baik dalam peningkatan baiknya pengelolaan keuangan desa.

2) Pengaruh Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa

Nilai t_{hitung} untuk variabel Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperoleh sebesar 3,842 sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas $n-k-1$ atau $72-2-1=69$ sebesar 1,995. Jika kedua nilai t tersebut dibandingkan maka nilai t_{hitung} masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($3,842 > 1,995$). Maka prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa semakin akuntabel aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa maka Pengelolaan keuangan desa akan semakin optimal.

3. Pengujian Hipotesis Simultan

Adapun hasil pengujian simultan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Hasil Pengujian Simultan

| | Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 2632.732 | 2 | 1316.366 | 28.319 | .000 ^b |
| | Residual | 3207.359 | 69 | 46.483 | | |
| | Total | 5840.092 | 71 | | | |

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas didapat nilai F_{hitung} penelitian ini sebesar 28,319. Sementara itu nilai F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dan df_1 sebesar $k = 2$ dan df_2 sebesar $N-k-1=72-2-1=69$ adalah sebesar 3,130. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F_{hitung} yang diperoleh jauh lebih besar F_{tabel} sehingga kompetensi SDM aparat desa dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

4. Koefisien Determinasi

Tabel 3: Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | .671 ^a | .451 | .435 |

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas maka dapat dilihat bahwa besar pengaruh (kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat) menggunakan nilai *Adjusted R Square*, sebesar 0,435. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 43,50% variabilitas pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dapat dijelaskan oleh kompetensi SDM aparat desa dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan sisanya sebesar 56,50% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor tersebut yakni pengetahuan aparat desa, keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa, pendidikan aparat desa, integritas aparat desa, motivasi kerja aparat desa, transparansi pengelolaan keuangan desa, disiplin kerja serta sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah desa.

Pembahasan

1. Pengaruh Kompetensi SDM Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM aparat desa terletak pada kriteria “kompeten” dengan skor sebesar 84,74%. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa di desa se Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Gorontalo memiliki kemampuan yang baik berupa pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa dalam upaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya hasil yang baik ini pula menjadi gambaran bahwa aparat desa memiliki pengalaman dan pendidikan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam menempati posisi sebagai aparat yang bertugas dalam mengelola keuangan atau dana desa.

Berdasarkan hasil tiap indikator ditemukan bahwa indikator yang tertinggi skornya yakni indikator 1 tentang kompetensi SDM intelektual yakni sebesar 87,06%. Sementara itu indikator yang terendah yakni indikator 2 tentang kompetensi SDM fisik atau keterampilan dengan skor 82,42%. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa

cenderung memiliki tingkat pengetahuan yang baik namun dalam praktek bekerja masih terdapat hal-hal yang perlu untuk dikembangkan seperti penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian sebanyak 53 orang responden (aparatur desa) atau sebesar 73,60% yang memiliki kompetensi SDM pada kriteria kompeten, sementara itu sebanyak 19 orang aparatur desa atau sebesar 26,40% yang memiliki kompetensi SDM aparatur desa cukup kompeten.

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Hasil pengujian regresi ditemukan bahwa kompetensi SDM aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa kompetensi SDM aparatur desa memberikan dampak yang baik dalam peningkatan baiknya pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan alokasi dana desa yang baik menjadi gambaran baiknya kinerja aparatur desa. Kinerja pemerintah selalu menjadi sorotan masyarakat karena dianggap belum menampilkan hasil yang baik yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintah untuk memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Menurut Mahsun yang dikutip oleh Auditya et al., (2013) kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik dengan jalan meningkatkan kompetensi SDMnya. Sehingga kompetensi SDM merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh aparatur desa, baik dari segi pendidikan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman.

Sehingga dengan kompetensi SDM aparatur desa yang baik maka aparatur desa akan memiliki hasil capaian pengelolaan keuangan desa yang baik dalam mengupayakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di desa se Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Hasil ini sejalan dengan pernyataan dari Basalamah (2017) bahwa kompetensi SDM dari seorang aparatur atau pegawai akan mampu mencapai tujuan dari suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan di tingkat desa.

2. Pengaruh Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terletak pada kriteria “cukup akuntabel” dengan skor sebesar 82,68%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertanggungjawaban yang jelas yang dibuat oleh para aparatur desa tentang dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah

daerah Kabupaten Bone Bolango untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Adanya pertanggungjawaban yang jelas ini akan membuat kredibilitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa semakin baik sehingga kinerjanya pun akan semakin meningkat dan tentunya akan berdampak baik bagi pencapaian visi dan misi desa yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan hasil tiap skor indikator ditemukan bahwa skor yang tertinggi yakni indikator 5 tentang prinsip akuntabilitas keuangan dengan skor sebesar 87,99% sedangkan yang terendah yakni indikator 2 sebesar 77,78% tentang prinsip akuntabilitas proses. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan pada proses pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa sebab adanya beberapa informasi yang belum jelas dan lengkap yang masih harus terus dibenahi oleh aparat desa. Namun untuk aspek pelaporan sudah memiliki progres yang baik. Dapat pula diketahui bahwa sebanyak 47 orang responden (aparat desa) atau sebesar 65,30% yang merasa pengelolaan keuangan desa sudah akuntabel sementara itu sebanyak 25 orang aparat desa atau sebesar 34,70% yang merasakan bahwa pengelolaan keuangan desa cukup akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparat desa telah berupaya untuk terbuka dalam penerimaan dan pengeluaran dana desa untuk kepentingan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip akuntabilitas sangatlah penting, sebab akan meningkatkan baiknya pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan dari hasil regresi bahwa Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa semakin akuntabel aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa maka Pengelolaan keuangan desa akan semakin optimal.

Hasil ini sesuai dengan pernyataan dari Garung & Ga (2020) bahwa dengan dilaksanakannya akuntabilitas dalam mengelola dana desa oleh aparat desa maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Otonomi daerah di tingkat pedesaan memerlukan adanya kontrol dari pemerintah di atasnya seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat atas sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh desa dan pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap proses pengelolaan keuangan desa tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan membuat pengelolaan alokasi dana desa oleh aparat desa akan semakin maksimal. Secara keseluruhan maka hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Sabarno (2007) bahwa Prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah termasuk oleh pemerintah di tingkat desa

3. Pengaruh Kompetensi SDM Aparat Desa Dan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pengujian regresi secara simultan ditemukan bahwa kompetensi SDM aparat desa dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. nilai *Adjusted R Square*, sebesar 0,435. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 43,50% variabilitas pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dapat dijelaskan oleh kompetensi SDM aparat desa dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan sisanya sebesar 56,50% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor tersebut yakni pengetahuan aparat desa, keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa, pendidikan aparat desa, integritas aparat desa, motivasi kerja aparat desa, transparansi pengelolaan keuangan desa, disiplin kerja serta sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah desa.

Hasil pengujian statistik deskriptif tentang pengelolaan keuangan desa ditemukan bahwa variabel pengelolaan keuangan desa terletak pada kriteria yang cukup baik dengan skor 83,26%. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa telah mampu untuk mengoptimalkan hasil kerja yang terkait dengan tanggung jawab dan amanahnya sebagai pengelola keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan. Dengan adanya kinerja yang optimal ini akan membuat perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan sesuai dengan indikator capaian pada RPJMD yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa aparat desa memiliki tingkat ketercapaian yang sudah sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan. Adanya hasil kerja yang baik tentu akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pembangunan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana untuk aksesibilitas ekonomi dalam menunjang tingginya perekonomian masyarakat desa setempat. Baiknya pengelolaan maka akan memberikan reward bagi pemerintah desa, salah satunya kepercayaan masyarakat dan prestasi yang akan dibanggakan oleh semua pihak dalam lingkup pemerintahan tingkat desa.

Berdasarkan hasil skor tiap indikator ditemukan bahwa skor yang tertinggi adalah indikator 1 tentang pengelolaan secara tertib dengan skor sebesar 88,89%. Kemudian indikator terendah yakni indikator 3 tentang efektif dengan skor sebesar 86,59%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dilakukan dengan tertib dan berintegritas namun dalam pencapaiannya masih belum begitu efektif atau realisasi masih kurang dari target. Kemudian sebanyak 47 orang responden (aparat desa) atau sebesar 65,30% yang mampu melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik sementara itu sebanyak 25 orang aparat desa atau sebesar 34,70% yang melakukan pengelolaan keuangan desa masih dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparat desa telah mampu untuk mencapai hasil kerja yang optimal dikarenakan adanya tuntutan untuk kompeten dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi SDM aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa kompetensi SDM aparat desa memberikan dampak yang baik dalam peningkatan baiknya pengelolaan keuangan desa.
2. Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Makna dari koefisien positif menunjukkan bahwa semakin akuntabel aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa maka Pengelolaan keuangan desa akan semakin optimal.
3. Kompetensi SDM aparat desa dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango dengan nilai determinan sebesar 43,50%. Sedangkan sisanya sebesar 56,50% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya bagi pemerintah kecamatan maupun Kabupaten melalui Inspektorat untuk melakukan sosialisasi secara bertahap dan rutin terutama mengenai regulasi terbaru mengenai alokasi dan desa, pengawasan dan perbaikan administrasi yang ada di Desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dengan langkah ini maka aparat desa akan mampu mengupayakan hasil yang baik dalam pencapaian kinerja baik secara individu maupun secara organisasi. Kemudian harus aktif dalam memberikan pendidikan, pelatihan serta pemberdayaan kepada aparat desa agar mampu melakukan pengelolaan yang tepat dan bijak dalam hal administrasi, keuangan dan teknis pembangunan sarana untuk kepentingan masyarakat desa
2. Sebaiknya aparat desa membuat laporan pertanggungjawaban secara jelas dan lengkap agar mampu menggambarkan secara detail mengenai sumber dan penggunaan dana desa yang digunakan. Langkah yang perlu dilakukan yakni dengan mengikuti format yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah dan secara intens melakukan koordinasi dengan pendamping desa dan dinas terkait dengan pertanggungjawaban tersebut.
3. Pengelolaan keuangan desa perlu untuk ditindaklanjuti dan diberikan arahan karena banyaknya temuan dalam pengelolaan keuangan desa yang secara teknis sudah baik namun dalam aspek administratifnya belum sesuai sehingga perlu untuk lebih dipertimbangkan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dan komitmen aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses maupun hasil penelitian, dimana untuk proses penelitian tidak menggunakan masyarakat sebagai penilai objektif pada kompetensi SDM aparat desa dan prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara pada hasil penelitian ditemukan nilai koefisien determinasi tidak begitu besar. Sehingga penting untuk mengembangkan

penelitian ini dengan instrumen yang membuat responden lebih objektif dan menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2014). *Kompetensi Aparat dalam Pelayanan Publik* (1st ed.). Deepublish.
- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Fairness*, 3(1), 21–42.
- Azhar, S. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Lingga Jaya.
- Basalamah, M. S. (2017). The Influence Of Motivation, Competence And Individual Characteristics On Performance Clerk (The Study) In The City Of Makassar. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 6(12), 148–153.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI.
- Mursyidi. (2010). *Akuntansi Dasar*. Ghalia Indonesia.
- Sabarno, H. (2007). *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika.
- Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.